MANAJEMEN RISIKO

PERANGKAT DAERAH













INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2025

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

			Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Informasi lain			IKU Renstra OPD	Sasaran Strategis	Tujuan Strategis	Sumber Data	OPD yang Dinilai	Urusan Pemerintahan	Periode yang Dinlai	Tahun Penilaian	Nama Pemda
Pit. Inspektur Pit. Inspektur H. AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19660902 199601 1 002	IKU Strategis: 1.1 Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal 1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat 2.1 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD 2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2.1 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	1.1 Nilai Hasil Evaluasi Sakin Komponen Evaluasi Internal 19.25		Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran	: Inspektorat	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	: 2025	: Pemerintah Kabupaten Pangandaran/Provinsi Jawa Barat

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Informasi Lain -	3.8 Per Daerah	3.7 F	3.6 P	3.5 A	3.4 A	3.3 A	3.2 A	3.1 F	2.2 F	Peng	2.1 F	1.2 P	1.1 F	3. PF		Program Inspektorat (Renja 2025) dan 1. PF	Tujuan Strategis Meni	Sumber Data Renji	: inspektorat	ntahan :		Tahun Penilaian : 2025	
	3.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.2 Pendampingan dan asistensi	Pengawasan	2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Renja Inspektorat Tahun 2025	KTOPAT	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Periode RPJMD Tahun 2021-2026		Pemerintah Kabupaten Pangandaran/Provinsi Jawa Barat
	27 Unit	12 Laporan	93 Persen	5 Paket 4 Dokumen	12 Dokumen	26 Laporan	34 Dokumen	93 Persen	54 Laporan		2 Rekomendasi	42 Laporan	60 Laporan	EN/KOTA	3		elayanan Publik yang Prima						

														Kegiatan dan indikator keluaran yang akan
Pangandaran, 12 Desember 2024 Pit: Inspektur Pit: Inspektur	1.2.1 Jumlah pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 33 L	1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.1.3 Jumlah laporan pengawasan APIP yang selesai di Tindaklanjuti 2 Lap	1.1.2 Jumlah Laporan Hasil pengawasan Desa dan Pengawasan Internal 224 L	1.1.1 Jumlah laporan Hasil pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan 53 L	1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.2 Pendampingan dan Asistensi	2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan:	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.1 Feliyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 1 Dono Consection Dona Consection Information	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Desember 2024 S.Pt., M.P Ja, IV/c 01 1 002	33 Laporan		2 Laporan	224 Laporan	53 Laporan									

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Nama OPD : Inspektorat
Tahun Penilaian : 2025

Periode yang Dinlai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026

Urusasan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan

Pemerintahan

	No Tuji	es .		2 Sasar OPD: akunta	() I	() T
	Tujuan/Sasaran Strategis	6	Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima	ategis ngkatnya s kinerja		
	Indikator Kinerja	C		a. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal		b. Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat
	Katego ri Risiko	О		Risiko Strategis		Risiko Strategis
Ric	Uraian	0		Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta	Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop	Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru
Risiko	Kode Risiko			RSO.24.35.04.01		RSO.24.35.04.02
	Pemilik	g		Inspektur		Inspektur
Sebab	Uraian	Ŋ		Kinerja OPD tidak sesuai		Kurangnya pemahaman pegawai terkait dengan regulasi
	Sumber	_		Eksternal		Internal
	C/UC			Uncontrol		Control
Dampak	Uraian	٨		Uncontrol Hasil penilaian AKIP kurang baik		Program Kerja tidak memberikan hasil Maksimal sehingga hasil penilaian Ekternal bisa lebih rendah dari target
	Pihak yang Terkena	-		Pemerintah Daerah	CHARLES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSO	Pemerintah Daerah

Formulir Kertas Kerja

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nama

OPD : Inspektorat
Tahun Penilaian : 2025

Periode yang Dinlai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusasan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Indikator Kaluawan Tahap Kategori Uralam Kode Riasko Pamilik Uralam Sumbor Curalam Pangawasan Pangaw		Indikator Keluaran	Tahap	Kategori		Kode Rieiko	Demilik) .	C/UC		Dihak
### PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROFILE PROGRAM ARUITabilitas Kinerja PROGRAM ARUITabilitas Kinerja PROGRAM ARUITabilitas Kinerja Berkurangrya Pangawasan Romanan Pangawasan Romanan Pangawasan Romanan Pangawasan Romanan Pangawasan Romanan Pangawasan Romanan Pangawasan Hasil Pengawasan				Risiko	-			uraian	Sumber		Uraian	
PENGAWASAN PENGARANAN Akuntabilias Kinerja PENGAWASAN P		C	۵	0	•	9	ъ		-	~	-	
Sistem Pengedalian (Item Penenintah Daerah Pengawasan Internal Sasaran: Sasaran: Internal Sasaran: Internal Sasaran: Internal Pengawasan Kinerja Pengawasan Kinerja Dengawasan Kinerja Dengawasan Kinerja Dengawasan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Jumlah Kalaran Jumla	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD										
Pengawasan Internal Sasaran: Berkurangnya Berkurangnya Itali Pongawasan Kreuja dan Sasaran: Berkurangnya Berkurangnya Itali Pongawasan Relati Pengawasan Alai Pengawasan Alai Pengawasan Alai Pengawasan Alai Pengawasan Alai Pengawasan Apip yang selesai Alai Pengawasan Apip yang selesai Ali Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD										
Kinerja dan Pengawasan Keuangan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Minimnya APIP yang selesai Minimnya Minimnya Hasil pengawasan Hasil		1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan										
Reungaman 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Hasil Pengawasan Pengawasan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Milimdaklanjuti Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ROO.24.35.04.01 Inspektur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai Roo.24.35.04.02 Inspektur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai Milimdaklanjuti Milimmya Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan APIP yang selesai Milimdaklanjuti Milimmya Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Hasil Pe	Sasaran:	Kinerja dan										
2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal Jumlah Laporan APIP yang selesai ditindaklanjuti Dengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Pengawasan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Pengawasan Internal ANII Inspektur dan kerja sama dari pihak yang diawasi Penmantu dan kerja sama dari pihak yang diawasi Penmantu diawasi Pe	Berkurangnya rekomendasi hasil	Pengawasan Keuangan										
Hasil Pengawasan Pengawasan Internal 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Operasional Keterbatasan Operasional Keterbatasan AROO.24.35.04.01 Inspektur Vilayah III dan kerja Jihak yang diawasi Pelaksanaan Operasional Keterbatasan AROO.24.35.04.02 Inspektur Kurangnya Beksternal Vilayah III Jihak yang Ji	pengawasan yang	2. Jumlah Laporan										
Pengawasan Internal 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindakianjutt Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Operasional Keterbatasan dokumen dari pihak yang diawasi Akses terhadap diawasi dan dan dokumen dari pihak yang diawasi data dan dokumen dari data dan dokumen dari pihak yang diawasi data dan dokumen dari data dan dokumen dari pihak yang diawasi data dan dokumen dari data dan dokumen dari pihak yang data dan dokumen dari data dan dokumen dari pihak yang data dan dokumen dari pihak yang data dan data dan dokumen dari pihak yang data dan dokumen dari pihak yang data dan		Desa dan										
Internal 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Operasional Keterbatasan APIP yang selesai Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pengawasan Kinerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Operasional Keterbatasan Jumlah Laporan AROO.24.35.04.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pengawasan Kinerja Pengawasan Operasional Keterbatasan Jumlah Laporan AROO.24.35.04.01 Jumlah Laporan Juncontrol Hasil pengawasan Juncontro		Pengawasan										
Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Pembantu Vilayah III Sama dari pihak yang diawasi Akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Minimnya Eksternal Uncontrol Fengawasan FOO.24.35.04.02 Inspektur Kurangnya Beksternal Uncontrol Fengawas tidak mendapatkan data yang dibutuhkan dalam mendam waktu yang menghambat menghambat		Internal										
APIP yang selesai Palaksanjuti Keterbatasan CO.24.35.04.01 Inspektur data dan Pembantu Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Minimnya data dan dari pihak yang Eksternal Uncontrol tidak Akurat Hasil pengawasan Kinerja data dan dokumen dari pihak yang Pelaksanaan Operasional Reterbatasan ROO.24.35.04.01 Inspektur Vinimnya Pembantu dan kerja sina dari pihak yang Eksternal Uncontrol tidak Akurat Hasil pengawasan Kinerja data dan dokumen dari pihak yang Uncontrol Pengawas tidak mendapatkan data dan dalam penyediaan Eksternal Uncontrol Pengawas tidak mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyediaan Wilayah III pemahaman dalam penyediaan Eksternal Uncontrol Pengawas tidak mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyediaan		3. Jumlah Laporan										
APIP yang selesal ditindaklanjuti Keterbatasan ROO.24.35.04.01 Inspektur Minimnya Eksternal Uncontrol Hasil pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Operasional Keterbatasan dari pihak yang Pembantu dan kerja Wilayah III Minimnya Eksternal Uncontrol Hasil pengawasan Pemerintah Daerah Daerah Operasional Keterbatasan dokumen dari pihak yang Wilayah III pihak yang Dihak yang		Hasil Pengawasan										
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Operasional Keterbatasan ROO.24.35.04.01 Inspektur data Minimnya kerja Eksternal Uncontrol Hasil pengawasan Kinerja data dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Keterbatasan dari pihak yang diawasi Wilayah III Wilayah III Sama dari pihak yang diawasi Wilayah III Sama dari pihak yang diawasi Wilayah III Keterbatasan data dan data dan data dan data dan data dan penyahambat Wilayah III Kurangnya dalam penyahambat Eksternal Uncontrol Pengawasan Kinerja diak Akurat		APIP yang selesai ditindaklanjuti										
Pengawasan Pemerintah Daerah Pengawasan Pembantu dan Milayah III dan kerja sama dari pihak yang diawasi Pengawasan ROO.24.35.04.02 Inspektur kompetensi dan yang dibutuhkan data yang dibutuhkan dalam penyediaan menghambat menghambat	A.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	=	Pelaksanaan		Keterbatasan akses terhadap	ROO.24.35.04.01	Inspektur Pembantu	Minimnya transparansi			Hasil pengawasan idak Akurat	
Pengawasan Pelaksanaan Operasional Keterbatasan ROO.24.35.04.02 Inspektur Kurangnya Eksternal Uncontrol data dan Pemerintah Daerah Operasional Keterbatasan dokumen dari pihak yang penyediaan penyediaan penyediaan penyediaan		Pemerintah Daerah			data dan		Wilayah III	dan kerja sama dari				
Pengawasan Pelaksanaan Operasional Keterbatasan ROO.24.35.04.02 Inspektur Kompetensi Pemerintah Daerah Pemerintah Pemerint					dokumen dari			pihak vand				
Pengawasan Pelaksanaan Operasional Keterbatasan akses terhadap ROO.24.35.04.02 Inspektur kompetensi dan dan dan dan dalam penyediaan Kurangnya Eksternal Uncontrol dalam penyediaan					pihak yang diawasi			diawasi	10110 - December			
Reuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pembantu kompetensi data dan dokumen dari pihak yang Pembantu kompetensi data dan pemahaman dalam penyediaan	A.1.2 Pengawasan		Pelaksanaan	\neg	Keterbatasan	ROO.24.35.04.02	Inspektur	Kurangnya	_	_	Pengawas tidak	
data dan Wilayah II dan dokumen dari pemahaman dalam penyediaan	Keuangan				hada		Pembantu	kompetensi		-	mendapatkan data	
dalam	Pemerintah Daerah				data dan		Wilayah II	dan			yang dibutuhkan	
penyediaan					dokumen dari			dalam		+ 6	enat sehingga	
					pihak yang			penvediaan		7.6	nenghambat	-

					Risiko			Sebab			Dampak
N _o	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian
			7	Onoracional	Data vana	DOO 34 35 04 03	Inenaktur	Tidak mamahami	חפזסחפ	Control	Informaci vano
A. 1. 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Reviu Laporan Kinerja	Pelaksanaan	Operasional	Data yang tidak akurat atau tidak relevan	ROO.24.35.04.03	Inspektur Pembantu Wilayah III	Tidak memahami terkait dalam mengisi formulir dan salah mengartikan informasi, atau menggunakan teknik pengumpulan data yang tidak sesuai	Laporan Hasil Reviu	Control	Informasi yang dikumpulkan tidak sesuai fakta, memicu kesalahan analisis
A.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		Kepatuhan	Tidak dilaksanakan nya prosedur pengawasan secara konsisten	ROO.24.35.04.04	Inspektur Pembantu Wilayah II	Tidak semua tahapan prosedur dipahami dengan baik, sehingga ada langkah yang dilewatkan	Internal	Control	Tidak adanya pengawasan yang konsisten membuka peluang terjadinya penyimpangan atau kecurangan
A. 1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Kemitraan	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	ROO.24.35.04.05	Sekretaris	Pihak pimpinan yang kurang mendukung atau tidak memberi contoh komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas	Eksternal	Uncontrol	OPD tidak menindaklanjuti TLHP
A.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
A.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Pelaksanaan	Kepatuhan	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	ROO.24.35.04.06	Inspektur Pembantu Khusus	Tidak ada evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut rekomendasi	Internal	Control	Pengawasan menjadi tidak efektif karena tindak lanjut dari rekomendasi tidak dievaluasi
A.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pelaksanaan	Fraud	Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala	ROO.24.35.04.07	Inspektur Pembantu Khusus	Lemahnya pengawasan dan Kontrol Internal	Eksternal	Control	Meningkatnya Pemerir Risiko Fraud atau Daerah Penyimpangan

N 0	Keqiatan	Indikator Keluaran		Kategori	. Zisiko				Sena		- 000
6	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	isiko	isiko Pemilik		Pemilik	Pemilik Uraian Sumber
8	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)									
	DAN ASISTENSI	Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas									
B.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
B. 1. 1. 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perencanaan	Reputasi	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	ROO.24.35.04.08	5.04.08	5.04.08 Sekretaris		Sekretaris	Sekretaris Tidak dilakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan, risiko, dan potensi masalah selama perencanaan
B.2	Pendampingan dan Asistensi Sasaran : Tersedianya Laporan hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan monev									
1 B.2	Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan	Operasional	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	ROO.24.35.04.09	35.04.09	35.04.09	kurangnya analisis kebutuhan dan risiko Tidak dilakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan proyek, potensi masalah, dan tantangan operasional		Kurangnya analisis kebutuhan dan risiko Tidak dilakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan proyek, potensi masalah, dan tantangan operasional

8	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Kategori	Risiko	Kode Risiko	ô	ko Pemilik		Pemilik Urais	Pemilik Uraian	Sebab Pemilik Uraian Sumber
			•	Risiko					+-			
B.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perencanaa n	Operasional	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	ROO.24.35.04.10	Inspektur Pembantu Khusus	Waktu Perencanaan yang Tidak Memadai Tekanan untuk segera menyelesaikan perencanaan mengorbankan proses yang seharusnya mendalam dan terstruktur	adai:	Internal		Internal
ο	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas										
C.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja										
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu										
C.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Operasional	Tidak dilaksanakannya prosedur pengawasan secara konsisten.	ROO.24.35.04.11	Inspektur Pembantu Khusus	Terbatasnya tenaga kerja, waktu, atau anggaran menyebabkan pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan	a, a, (an (an in tidak ecara	a Internal a, (an (an in tidak ecara an	a Internal a, an r tidak ecara	a, an an tidak ecara

Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran

: Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a Berisiko Strategis Inspektorat 1 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perbaikan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop 2 Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru 3 SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi II Risiko Operasional Inspektorat Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi 2 Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi 3 Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasion								Analisis Ris
Risiko Strategis Inspektorat Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perbaikan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan Risiko Strategis regulasi terbaru SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi Risiko Operasional Inspektorat Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Coperasional Operasional	N _o	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kategori Risiko	Kode Risiko	0	Skala Dampak	Skala Skala ampak Kemungkinan	
Risiko Strategis Inspektorat Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan Risiko Strategis regulasi terbaru SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi Risiko Operasional Inspektorat Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional	O)	D	c	đ		0	6	e f g
Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan Risiko Strategis regulasi terbaru SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi Risiko Operasional Inspektorat Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional Operasional	_	Risiko Strategis Inspektorat						
Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan Risiko Strategis regulasi terbaru SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi Risiko Operasional Inspektorat Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional Operasional	_	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis,	Risiko Strategis	RSO.24.35.04.01		4	4	
SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi Risiko Operasional Inspektorat Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional Operasional		Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru	Risiko Strategis	RSO.24.35.04.02		ω		ယ
Risiko Operasional Inspektorat Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional	ω	SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi	Risiko Strategis	RSO.24.35.04.03	-	4		4
Risiko Operasional InspektoratCoperasionalKeterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihakOperasionalYang diawasiCoperasionalKeterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihakOperasionalYang diawasiOperasionalData yang tidak akurat atau tidak relevanOperasional								
Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional	=	Risiko Operasional Inspektorat						
Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak Operasional yang diawasi Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional	_	Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen dari pihak yang diawasi	Operasional	ROO.24.35.04.01	2	01 3		ы
Data yang tidak akurat atau tidak relevan Operasional		_	Operasional	ROO.24.35.04.02	02	02 2		2
		Data yang tidak akurat atau tidak relevan	Operasional	ROO.24.35.04.03	1.03	1.03 2		2

					Analisis Risiko	isiko	
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kategori Risiko	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Peringkat Risiko
4	Tidak dilaksanakannya prosedur pengawasan secara konsisten	Kepatuhan	ROO.24.35.04.04	2	2	19	7
5	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	Kemitraan	ROO.24.35.04.05	ω	ω	1	15
တ	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	Kepatuhan	ROO.24.35.04.06	4	4	4	22
7	Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala	Fraud	ROO.24.35.04.07	ω	ယ	11	15
œ	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	Reputasi	ROO.24.35.04.08	2	2	19	7
9	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	Operasional	ROO.24.35.04.09	2	2	19	7
10	Perencanaan tidak komprehensif, ruang lingkup pengawasan tidak jelas atau terlalu luas	Operasional	ROO.24.35.04.10	2	3	15	11

Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda

Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan

2025

: Pemerintah Kabupaten Pangandaran

ː Meningkatkan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima ː Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

ယ	2	_	=	Ø	8
SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi	Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop	Risiko Strategis Inspektorat	b	Risiko Prioritas
22	15	22		C	Peringkat Risiko
RSO.24.35.04.03	RSO.24.35.04.02	RSO.24.35.04.01		d	Kode Risiko
4		4		0	Skala Risiko
Inspektur	Inspektur	Inspektur		-	Pemilik Risiko
Kurang Kompetensi dan Kinerja pemahaman Organisasi terkait pengendalian dan internal dan ketidakefisi tidak adanya dalam pelatihan rutin pelaksanaa bagi pegawai tugas dan I dalam pelatihan Organisasi SPIP	Kurangnya Prog pemahaman tidak pegawai terkait hasil dengan regulasi sehir penili bisa	Kinerja OPD tidak sesuai		g	Penyebab
Penurunan Kinerja Corganisasi akibat ketidakefektifan dan dan dan ketidakefisienan adanya dalam n rutin pelaksanaan pegawai tugas dan Fungsi pelatihan Organisasi	Program Kerja tidak memberikan thasil Maksimal isehingga hasil penilaian Ekternal bisa lebih rendah dari target	AKIP kurang baik		7	Dampak

8	س	=	_	N	ω
Risiko Prioritas	Ь	Risiko Operasional Inspektorat	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala
Peringkat Risiko	C		15	22	15
Kode Risiko	0		ROO.24.35.04.05	ROO.24.35.04.06	ROO.24.35.04.07
Skala Risiko	0		11	4	1
Pemilik Risiko	-		Sekretaris	Inspektur Pembantu Khusus	Inspektur Pembantu Khusus
Penyebab	g		Pihak pimpinan OPD yang kurang meni TLHF atau tidak memberi contoh komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut rekomendasi	Lemahnya pengawasan dan Kontrol Internal
Dampak	h		npinan OPD tidak kurang menindaklanjuti ng TLHP tidak contoh nsi	Pengawasan menjadi tidak efektif karena tindak lanjut dari trekomendasi tidak dievaluasi	MeningkatnyaRisiko Fraud atauKontrol Penyimpangan

Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima

Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

ω ω σ ν	2 tic S	۵۵ کا تا	= 2	ω.	N o
SPIP tidak berfungsi secara berkelanjutan atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dengan Organisasi	Sistem atau prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi terbaru	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur RSO.24.35.04.01 (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop	Risiko Strategis Inspektorat	ď	Risiko Prioritas
RSO.24.35.04.03	RSO.24.35.04.02	RSO.24.35.04.01		C	Kode Risiko
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP		þ	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko		8	Celah Pengendalian
Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten dengan melampirkan contoh dokumen penilaian yang sesuai	Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten	Melakukan kajian lebih dalam dan membuat daftar dokumen yang real terkait pedoman yang telah ada		•	Rencana Tindak Pengendalian
Inspektur	Inspektur	Inspektur		g	Pemiliki Penangungg Jawab
Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025		5	Target Waktu Penyelesaian

3 dil	2 ∃	1 da R	≡ R	No
Monitoring tindak lanjut tidak dilakukan secara berkala	Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran untuk melaksanakan evaluasi secara berkala	Resistensi atau kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi	Risiko Operasional Inspektorat	Risiko Prioritas
ROO.24.35.04.07	ROO.24.35.04.06	ROO.24.35.04.05		Kode Risiko
Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor 700/Kpts.008- Insp/2019 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor 700/Kpts.008- Insp/2019 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi		Celah Pengendalian
Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tersebut apakah bisa ditindaklanjuti ataukah masuk ke dalam rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	Membuat ruang lingkup penugasan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia	Membuat kebijakan terkait penanggungjawab pada setiap komponen		Rencana Tindak Pengendalian
Inspektur Pembantu Khusus	Inspektur Pembantu Khusus	Sekretaris		Penangungg Jawab
Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025		Target Waktu Penyelesaian

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Tujuan Strategis Tahun Penilaian

: 2025

: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Publik yang Prima

Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

N O	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
ص	5	c	ď	9		f
_	Melakukan kajian lebih dalam dan membuat daftar dokumen yang real terkait pedoman yang telah ada	Keputusan Inspektur	Sekretaris	Inspektur	Ta	Tahun 2025
2	Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten	Peraturan Bupati	Inspektur	Bagian Hukum	Te	Tahun 2025
ω	Membuat Kebijakan turunan di Kabupaten dengan melampirkan contoh dokumen penilaian yang	Peraturan Bupati	Inspektur	Bagian Hukum Setda	4	Tahun 2025 Akhir tahun 2025
4	Membuat kebijakan terkait penanggungjawab pada setiap komponen	Keputusan Inspektur	Sekretaris	Tim pengawasan	Т	Tahun 2025
5	Membuat ruang lingkup penugasan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia	Program kerja	Tim pengawasan	Inspektur		Tahun 2025
б	Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tersebut apakah bisa ditindaklanjuti ataukah masuk ke dalam rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	Hasil monitoring	Sekretaris	Objek Pemeriksaan		Tahun 2025